

**“PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEREBUTAN HARTA
BERSAMA SETELAH BERCERAI”
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh:

RIO PRAHESTIO
C.100.110.011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

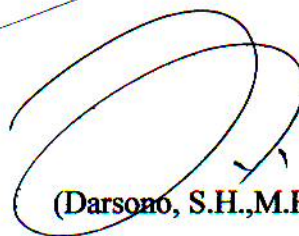
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

Pembimbing II



(Darsono, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum.)

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEREBUTAN HARTA BERSAMA
SETELAH BERCERAI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**

Rio Prahestio
C.100.110.011
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: rprahestio@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembagian harta bersama menurut hukum Islam, hukum adat, dan BW (*burgerlijke wetboek*), Mendiskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pembagian harta bersama suami istri setelah bercerai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat adalah sama besarnya, sehingga antara kedua belah pihak mempunyai posisi yang sama untuk mendapatkan harta bersama tersebut. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara bahwa Penggugat mampu untuk membuktikan mengenai objek sengketa, dimana harta tersebut termasuk dalam harta bersama. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dalam penyelesaian sengketa harta bersama dikabulkan, sehingga harta bersama tersebut harus dibagi secara adil yakni sama besarnya.

Kata kunci: harta bersama, pertimbangan hakim, penentuan putusan

ABSTRACT

This study aims to determine the division of joint property according to Islamic law, customary law, and BW (*Burgerlijke Wetboek*), describe the consideration of the judge in determining the verdict on the division of joint property of husband and wife after divorce. The method used in this research is a normative method, the type of research is descriptive research. The data source consists of primary data and secondary data. Data were collected through library research and interviews, then analyzed by methods of qualitative analysts. The results showed the position of the plaintiff and defendant are the same magnitude, so between the two sides have the same position to get the treasure together. Consideration of the judge in determining the case proving that the claimant is able to prove the object of dispute, where such property is included in the joint property. Consideration of the judge in determining the verdict in the dispute settlement granted the joint property, so the joint property should be divided equitably the same magnitude.

Keywords: treasure together, consideration of the judge, determining the verdict

PENDAHULUAN

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, menyebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian perkawinan ini, sudah jelas bahwa tujuan manusia melakukan perkawinan adalah untuk menjalankan kehidupannya dan melanjutkan keturunan. Manusia berusaha untuk hidup berkeluarga (melakukan perkawinan) agar memperoleh keturunan dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapatlah diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan suatu perkawinan karena sebab lain dari kematian diberikan pembatasan yang cukup ketat, hal tersebut diketahui dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan kalau ada cukup alasan antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut pada

¹ Eoh, O.S. 2001, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sri Gunting, hal. 8

prinsipnya menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.²

Perkawinan sebagai peristiwa hukum, mempunyai akibat-akibat yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Akibat perkawinan terhadap *persoon* suami istri adalah timbulnya hubungan hukum antara suami dan istri, yang muncul dari hubungan kekeluargaan. Hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban yang muncul disini adalah hak dan kewajiban yang bersifat *persoonlijk*/pribadi.³

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974). Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)). Perkawinan yang putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pengertian yang dimaksud dengan ‘hukumnya’ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.⁴ Maksud dari bunyi Pasal 37 “*menurut hukumnya masing-masing*” di sini adalah hukum selain dari Undang-

² *Ibid.*, hal 39-40

³ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 28

⁴ *Ibid.*, hal.122-123

Undang Perkawinan tersebut yang mengatur mengenai pembagian harta dalam perkawinan, misalnya hukum agama, adat dan hukum-hukum lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui proses pembagian harta bersama menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan BW (*Burgerlijke Wetboek*), untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian harta dalam perkara pembagian harta bersama suami istri setelah bercerai dan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas pembagian harta bersama suami istri setelah bercerai.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif karena yang diteliti adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif.⁵ Maksudnya menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis terhadap proses penyelesaian sengketa perebutan harta bersama. Alasan menggunakan metode penelitian deskriptif adalah untuk memaparkan kenyataan-kenyataan aturan yang telah diundangkan, selain itu untuk menggambarkan keadaan-keadaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai proses penyelesaian sengketa perebutan harta bersama agar dapat lebih jelas dalam memahaminya.

Sumber data terdiri dari data primer yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari KUHPdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi (Putusan Hakim) dan data sekunder

⁵ S. Noto Atmojo, 2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 32.

yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur mengenai perkawinan dan perceraian. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Hukum Adat dan BW (*Burgerlijke Wetboek*)

Terjadinya suatu perceraian dalam perkawinan akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama, yang di mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pembagiannya bisa menurut hukum agama, hukum adat atau hukum perdata.

Menurut Hukum Islam

Pembagian harta bersama menurut hukum Islam yaitu didasarkan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, yakni didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harta yang diperoleh setelah terjadi perkawinan baik yang diperoleh suami atau isteri disebut harta bersama dan apabila terjadi perceraian maka harus dibagi secara adil dan berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*ash-Shulhu*" yaitu suatu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.⁶

Pembagian mengenai harta bersama pada dasarnya telah disebutkan dan dijelaskan dalam ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yakni, Pasal 97,

⁶ Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 14 Desember 2015, Pukul 09.20 WIB

ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam harta bersama antara suami-istri apabila terjadi perceraian masing-masing akan mendapatkan 50% (Setengah bagian), hal tersebut akan lain apabila suami-istri sepakat untuk membagi harta dengan prosentase tertentu.

Menurut ketentuan hukum Islam, apabila selama dalam pernikahan tidak ada perjanjian perkawinan terlebih dahulu, maka pembagian harta bersama tersebut didasarkan pada kesepakatan dari masing-masing pihak. Apabila dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pembagian harta bersama tersebut didasarkan pada peran dan kedudukan masing-masing pihak. Pembagian harta tersebut sudah seharusnya dilakukan dengan prosentase yang adil antara pihak suami dan istri, karena dalam hal ini masing-masing pihak mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Hukum Islam dalam hal ini memandang bahwa pembagian harta bersama tersebut harus dibagi secara adil, yakni sama besarnya masing-masing memperoleh setengah bagian, karena di antara kedua belah pihak mempunyai peran dan kedudukan serta kontribusi yang sama.⁷

Menurut Hukum Adat

Pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut ketentuan hukum adat, mempunyai pengertian dan ketentuannya sendiri. Menurut hukum adat harta bersama disebut dengan harta gono-gini. Yang mempunyai arti, harta yang dikuasai oleh pihak suami dan isteri selama terikat perkawinan. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama yang diatur menurut hukum adat biasanya

⁷Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 14 Desember 2015, Pukul 09.20 WIB

tidak terjadi kesamaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain. Pembagian harta bersama menurut hukum adat berbeda-beda cara pembagiannya, hal ini tergantung dengan adat yang digunakan yang dianut oleh para pihak yang berperkara.⁸

Secara garis besar pembagian harta bersama menurut hukum adat didasarkan pada nilai keadilan dan musyawarah, yang dalam perkembangannya menjadi suatu nilai kebiasaan dalam masyarakat. Ketentuannya siapapun yang mencari penghasilan, maka hasilnya menjadi milik bersama dan harus dibagi secara adil apabila terjadi perceraian. Hal ini berdasarkan kedudukan masing-masing pihak, yang di mana suami memang yang mencari harta atau penghasilan, sedangkan istri adalah orang yang memelihara harta tersebut. Kesimpulannya kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang setara, dalam fungsi yang berbeda, tapi tetap mempunyai kontribusi yang sepadan dalam proses adanya harta tersebut, sehingga sudah seharusnya pembagian tersebut dilakukan secara adil, yakni dibagi sama rata antar masing-masing pihak.

Menurut Hukum BW atau *Burgerlijke Wetboek* (KUHPerdara)

Pengertian harta bersama menurut Hukum BW adalah harta yang diperoleh atau didapat sejak dilangsungkannya perkawinan. Menurut ketentuan dalam BW Pasal 119, bahwa harta yang dihasilkan semenjak terjadinya perkawinan merupakan termasuk harta bersama, dimana harta tersebut merupakan gabungan harta dari pihak suami dan isteri. Pada dasarnya Pembagian harta bersama dalam hukum BW telah diatur sedemikian rupa di dalam BW itu sendiri, mulai dari dilangsungkannya perkawinan sampai setelah terjadi perceraian. Harta

⁸ Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 14 Desember 2015, Pukul 09.20 WIB

bersama hakikatnya adalah harta yang diperoleh secara bersama setelah terjadi perkawinan atau terikat perkawinan. Harta ini meliputi harta suami dan harta isteri yang digabungkan menjadi satu. Konsekuensinya apabila terjadi perceraian maka harta ini dibagi secara rata dan adil kecuali dengan kesepakatan kedua pihak untuk menentukan lain.⁹

Ketentuan dalam Pasal 128, telah dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal harta tersebut. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil dan rata tanpa mempersoalkan dari pihak mana asalnya atau siapa yang menghasilkan harta tersebut. Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menghargai pihak suami dan pihak istri dalam perkawinan, di mana antara pihak suami dan istri mempunyai peran dan kedudukan yang sama, sehingga sudah seharusnya antara kedua belah pihak mendapatkan hasil yang sama apabila terjadi perceraian, agar nilai keadilan dapat dirasakan antar kedua belah pihak tersebut.

Hakim dalam Menentukan Pembuktian Harta dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Suami-Istri Setelah Bercerai

Proses penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian, dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim akan menentukan beban pembuktian kepada para pihak untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan di dalam persidangan.

⁹Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 14 Desember 2015, Pukul 09.20 WIB

Penggugat telah mengajukan gugatan di pengadilan, yang pada intinya dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa harta perkawinan yang berupa tanah dan pekarangan berupa rumah di atasnya, dihasilkan atau dibeli semasa dalam ikatan perkawinan adalah benar, sehingga dalam hal ini harta tersebut bisa dikatakan termasuk dalam harta bersama, dan harus dibagi dua secara adil. Gugatan tersebut diperkuat oleh Penggugat dengan adanya alat bukti surat berupa sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta P(4).

Tergugat telah memberikan bantahan dalam pembuktianya di persidangan, yang pada intinya bahwa pembelian harta yang menjadi objek sengketa adalah hasil kerja Tergugat sendiri, tanpa melibatkan pihak istri atau pihak tergugat. Penggugat selaku istri tidak pernah bekerja, sehingga tidak mempunyai aktivitas yang bernilai ekonomis. Dengan demikian dalam pembelian tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut pihak istri dianggap tidak mempunyai andil, oleh karenanya harta atau objek sengketa tersebut sudah seharusnya menjadi milik pihak tergugat.

Berdasarkan kesimpulan fakta-fakta hukum tentang pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat di atas, maka di peroleh hasil kesimpulan pembuktian hakim sebagai berikut:

Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya di mana pembelian harta yang menjadi objek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.¹⁰ Pembelian tanah beserta bangunan berupa rumah di atasnya yang menjadi objek sengketa dilakukan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami-istri. Dengan demikian pembelian tersebut bukan dilakukan

¹⁰Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 14 Desember 2015, Pukul 09.20 WIB

oleh Tergugat saja, melainkan juga melibatkan pihak Penggugat selaku sebagai seorang istri. Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahan, baik melalui keterangan saksi maupun keterangan tertulis. Bahwa harta yang menjadi objek sengketa berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah di atasnya adalah hasil pembelian pihak Tergugat sendiri tanpa melibatkan pihak penggugat, yang dalam hal ini statusnya sebagai istri. Berdasarkan keterangan saksi maupun alat bukti surat tidak ada yang menyatakan atau membenarkan dari bantahan Tergugat.

Dengan demikian maka harta yang menjadi objek sengketa, termasuk dalam harta bersama, yang dimana pembagian harta bersama tersebut harus dibagi secara adil antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat. Masing-masing pihak mempunyai kontribusi dan peran yang sama selama dalam pernikahan, oleh karenanya harta bersama tersebut sudah seharusnya dibagi dua yang sama besarnya antara pihak Penggugat dan Tergugat.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan atas Pembagian Harta Bersama Suami-Istri Setelah Berceraai

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran, serta menetapkan hubungan hukum, sehingga dalam suatu putusan pengadilan terlebih dahulu harus ada pertimbangan-pertimbangan mengenai duduk perkara, dan kemudian pertimbangan-pertimbangan mengenai hukumnya.¹¹

Sementara itu, yang menjadi inti isi gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa harta perkawinan antara suami-istri yang berupa tanah dan

¹¹ Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, hal 124.

bangunan yang berdiri di atasnya yang dibeli semasa dalam pernikahan adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama) yang belum pernah diadakan pembagian, sehingga sudah seharusnya harta bersama tersebut patut dibagi 2 (dua) dengan sama besar diantara Penggugat dan Tergugat.

Mengenai kesimpulan pembuktian majelis hakim berpendapat bahwa pembelian harta yang menjadi objek sengketa berupa tanah dan bangunan berupa rumah di atasnya tersebut, sebagai harta bersama antara Penggugat dan tergugat. Pembelian tanah beserta bangunan berupa rumah yang sekarang menjadi objek sengketa dilakukan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami-istri, sehingga dalam hal ini pembelian tersebut bukan dilakukan oleh Tergugat sendiri, melainkan juga melibatkan pihak Penggugat selaku sebagai seorang istri. Dengan demikian objek sengketa tersebut termasuk dalam bagian harta bersama dalam perkawinan, hal tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat berupa sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta P(4), serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bernama Andi bin Ali (bukan nama sebenarnya) dan Fatimah binti Sulaiman (bukan nama sebenarnya) yang keterangannya saling berkesesuaian telah menguatkan.¹²

Mengenai pertimbangan hukumnya majelis hakim berkesimpulan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 88, telah disebutkan bahwa: Apabila

¹²Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin 14 Desember 2015, Pukul 09.20 WIB

terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.¹³

Sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai harta bersama suami isteri mempunyai hak yang sama terhadap harta tersebut, serta dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, di mana dalam hal ini tidak terdapat persetujuan antar kedua belah pihak dalam pembagiannya. Dengan demikian Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang didasarkan pada hasil kesimpulan pembuktian yang dimana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dan atau yang disengketakan adalah merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya masing-masing pihak mempunyai hak yang sama terhadap harta tersebut, yakni adalah separo ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Penggugat dan separo ($\frac{1}{2}$) bagian lainnya untuk Tergugat.

Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, serta duda atau janda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (setengah) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁴

Ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian tentang harta bersama terlebih dahulu sebelum perkawinan, oleh karenanya pada

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 88, hal.12.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 97, hal. 13.

Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian harta tersebut sesuai dengan keadilannya sebagaimana dalil syar'i dalam surat An-Nisa Ayat 32 yang artinya: "*Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan*". Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap penetapan dan pembagian harta bersama dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang inti amarnya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa beserta bangunan yang terletak di atasnya adalah sebagai harta bersama, serta menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan separo ($\frac{1}{2}$) bagian. Ketentuan dari isi amar putusan tersebut, dapat terlihat bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dalam perkawinan, sehingga harta bersama tersebut di bagi secara adil.¹⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, dalam pembagian harta bersama bisa menggunakan Hukum Islam, Hukum Adat dan BW (*Burgerlijke Wetboek*). Ketentuan menurut ketiga hukum tersebut mendasarkan pada peran dan kedudukan masing-masing pihak yakni pihak suami dan pihak isteri, di mana apabila kedua belah pihak

¹⁵Hadi Suyoto, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Senin, 14 Desember 2015, Pukul 09.20 WIB

mempunyai peran dan kontribusi yang sama maka pembagian harta bersama tersebut harus dibagi secara adil yakni dibagi dua.

Kedua, mengenai pembuktian, Penggugat mampu membuktikan bahwa pembelian harta yang menjadi objek sengketa dilakukan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri sehingga harta yang menjadi sengketa tersebut termasuk dalam harta bersama yang dimana pembagian harta bersama tersebut harus dibagi secara adil antara pihak Penggugat dan Tergugat karena sewaktu dalam pernikahan para pihak mempunyai kontribusi yang sama.

Ketiga, pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama setelah bercerai dimana gugatan Penggugat dikabulkan karena Penggugat mampu untuk membuktikan dalil gugatannya dan majelis hakim memberikan putusan yang intinya harta tersebut dibagi secara adil yaitu sama besarnya, masing-masing mendapatkan setengah bagian.

Saran

Pertama, bagi Penggugat dan Tergugat diharapkan ke depannya untuk lebih memperat tali persaudaraan. Komunikasi merupakan hal penting dalam menjaga silaturahmi, walaupun dalam hal ini antara keduanya bukan lagi menjadi suami istri tetapi di antara mereka tetap mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan mendidik anak kandung mereka.

Kedua, bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama agar tetap cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus terhadap perkara penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian. Majelis Hakim diharapkan mampu untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana, serta mampu

memberikan nasihat dan petuahnya di dalam persidangan, agar mampu menjadi cerminan dan pembelajaran bagi masyarakat secara umum.

Ketiga, bagi pembaca dengan adanya hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kehati-hatian, agar tidak terjadi kasus yang serupa, dan juga diharapkan mampu menimbulkan rasa saling menghargai dalam lingkup keluarga, serta dalam setiap melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam melakukan pembagian harta bersama dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmojo, S. Noto, 2003, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Eoh, O.S, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sri Gunting.

Satrio, J, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam tentang *Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001.